



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

SUBBAGIAN HUMAS

Halaman 2

Bupati Pekalongan Diperiksa (Dugaan Korupsi RSUD Kraton)

Dugaan Korupsi RSUD Kraton

SEMARANG - Bupati Pekalongan Asip Kholbihi diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Jumat (3/3). Pemeriksaan tersebut terkait dugaan korupsi insentif pegawai di RSUD Kraton Pekalongan yang terjadi dari 2014 hingga 2016

dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 5 miliar. Orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan itu menjalani pemeriksaan di ruangan penyidik dari pukul 14.00 hingga 17.00.

"Yang bersangkutan kami periksa sebagai saksi. Ini pemeriksaannya yang pertama," ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes Lukas Akbar Abriari, kemarin.

Dalam kasus ini, lanjut dia, tidak hanya Asip yang diperiksa, namun pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan kepada siapa saja yang diduga menerima uang tersebut termasuk Arini Harimurti, Wakil Bupati Pekalongan yang tak lain adalah istri mantan Bupati Amat Antono.

"Dia (Arini-red) akan kami periksa Senin (6/3) mendatang," ujarnya.

Diakuinya, Asip memang mengaku telah menerima uang Rp 90 juta, namun uang tersebut sudah dikembalikan dan sekarang sudah disita oleh pihaknya sebagai barang bukti. "Uang itu sudah dikembalikan," jelasnya.

Disinggung terkait penetapan tersangka, Lukas membeberkan hingga saat ini pihaknya belum menetapkan tersangka terkait kasus tersebut.

Dicecar 31 Pertanyaan

Menurutnya, untuk menetapkan tersangka kalau sudah ada perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Belum ada hasil audit dari BPK, kalau hitungan dari kami kerugian negara mencapai Rp 5 miliar," ujarnya.

Sebelumnya, lanjut Lukas, pihaknya juga melakukan pemeriksaan Amat Antono, Bupati Pekalongan sebelum Asip Kholbihi, Rabu (15/2) lalu. Sementara itu Asip Kholbihi mengatakan, dalam

pemeriksaan yang dilakukan selama tiga jam tersebut dia dicecar 31 pertanyaan oleh penyidik. Adapun, lanjut dia, pertanyaan yang dilontarkan kepadanya seputar mekanisme pengelolaan RSUD Kraton yang berkaitan dengan kebijakan keuangan.

"Ditanya seputar itu, tapi saya tidak mengetahui banyak, kan saya baru dilantik pada Juni 2016 lalu," ungkapnya.

Meski tidak tahu asal mula terkait kebijakan tersebut, dia mengaku telah menerima uang yang berkaitan dengan hal tersebut secara tiga kali berturut-turut dengan total Rp 90 juta. "Uang itu sempat mampir ke saya tiga kali, tapi sudah saya kembalikan," ungkapnya.

Terkait pemeriksaan, dia mengatakan akan selalu kooperatif dan siap kapan saja kalau dimintai keterangan oleh penyidik.

"Sebagai warga negara yang baik tentunya saya akan mematuhi aturan," ujarnya. Adapun, pengungkapan kasus tersebut bisa dikatakan sebagai momentum pihaknya untuk melakukan perbaikan dalam Badan Layanan Umum Daerah itu. (K44-67)